

Implikasi Aksiologi dalam Ilmu Administrasi Negara

Nia Endri Wiranti¹, Azmi Fitrissia², Ofianto³

^{1,2,3} Universitas Negeri Padang

Email: niaendriwiranti0422@gmail.com

Abstrak

Keberadaan dan perluasan filsafat ilmu bergantung pada hubungan timbal balik dan saling pengaruh antara filsafat dan ilmu. Hakikat ilmu adalah objek filsafat ilmu formal. Terdapat konsep dasar kehidupan dalam filosofi administrasi yang mencerminkan keberadaan, identitas, dan manifestasinya untuk mencapai efisiensi dan efektivitas dalam administrasi kerja. Pada hakekatnya, kemajuan ilmu administrasi merupakan kajian mendalam terhadap ranah akal manusia yang mampu menembus luka dunia yang ditandai dengan gerakan rasionalitas dalam bidang filsafat ilmu administrasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami aksiologi yang terkandung dalam ilmu administrasi negara. Metode deskriptif kualitatif digunakan untuk investigasi. Menurut penelitian, ilmu ketatanegaraan dengan pendekatan aksiologis mempersoalkan nilai-nilai yang berkembang, antara lain nilai daya tanggap, partisipasi pekerja dan warga negara dalam pengambilan keputusan, keadilan sosial, dan pilihan warga negara.

Kata Kunci: Filsafat Administrasi, Aksiologi, Administrasi Negara.

Abstract

Philosophy and science have mutually beneficial relationships and influences, which are essential to the development and continuation of the philosophy of science. Formal philosophy of science examines fundamental questions about the scientific enterprise. Administrative philosophy includes a concept of life that reflects its existence, identity, and manifestation for the sake of efficiency and effectiveness in managing the workplace. The philosophical field of administrative science is marked by a movement toward reason, and its advancement is essentially a study of the realm of the human mind that can penetrate the world's wounds. This research aims to decipher the axiology underlying the discipline of public administration. The research employed a qualitative descriptive approach. According to studies, constitutional science that takes an axiological approach raises doubts about commonly held values like responsiveness, worker and citizen participation in decision making, social justice, and citizen agency.

Keywords: *Administrative Philosophy, Axiology, State Administration*

PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu pengetahuan sangat bergantung pada pertimbangan filosofis. Untuk menghargai kontribusi filsafat terhadap sains, pertama-tama seseorang harus memahami disiplinnya. Kata asli untuk "filsafat" berasal dari bahasa Yunani Kuno dan berasal dari kata philosophia. Istilah Yunani untuk filsafat, sophia, berasal dari kata philos (seperti) atau philia (persahabatan) (keahlian, keahlian, pengetahuan, keterampilan, pengalaman praktis, kecerdasan). Singkatnya, filsafat adalah pengejaran kebijaksanaan (Tarigan et al, 2022). Lebih parahnya lagi, banyak yang mengklaim bahwa

filsafat adalah disiplin ilmu yang melarang menyelidiki masalah kebenaran, hakikat alam, Tuhan, dan kemanusiaan.

Gerakan kehidupan didasarkan pada perilaku hukum Tuhan dan hukum horizontal yang disusun oleh dan atas kesepakatan universal, dan filsafat menyentuh banyak aspek kehidupan manusia, mewujudkan semua realitas ini, dan menggambarkan suasana damai dan damai atas dasar ini. hukum. umat manusia. Hukum Tuhan dan hukum manusia tidak bertentangan secara diametris satu sama lain; sebaliknya, mereka dapat didamaikan pada banyak tingkatan dalam keluhuran karakter dan digunakan untuk membangun jembatan di atas jurang yang memisahkan masalah kemanusiaan dari asalnya, memberikan wawasan dan integritas dalam prosesnya. solusi Mengingat penelitian terbaru (Bachtiar, 2012).

Ilmu administrasi merupakan salah satu penemuan ilmiah yang terjadi. Namun, pertumbuhan administrasi sebagai falsafah terlihat lebih lambat dibandingkan dengan perkembangan administrasi sebagai administrasi, khususnya dalam penerapan administrasi yang meliputi fungsi-fungsi manajemen (Fauzan, 2018). Hal ini disebabkan oleh perubahan situasi kehidupan manusia yang dipicu oleh terobosan teknologi informasi dan komunikasi secara menyeluruh. Sedangkan ilmu administrasi dan tugas manajemen berkembang seiring dengan semakin kompleksnya keinginan dan tuntutan manusia (Sawir, 2021).

Evolusi ilmu administrasi terkait erat dengan evolusi administrasi sebagai filsafat. Ini karena filsafat administrasi meletakkan fokus yang lebih besar pada ide-ide berdasarkan teori kebenaran filosofis. Sementara itu, administrasi sebagai suatu disiplin ilmu semakin dituntut untuk meletakkan dasar kebenaran dalam implementasinya pada setiap tahap evolusinya (Siagian, 2011). Filsafat administrasi dan ilmu administrasi dengan demikian terkait erat. Pemahaman keagamaan harus diimbangi dengan perluasan dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Dengan kata lain, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang berbasis pada peningkatan kecerdasan intelektual manusia harus dibarengi dengan peningkatan kecerdasan spiritual manusia yang mengedepankan etika ilmiah dan meletakkan dasar-dasar kebenaran dalam hakikat kemanusiaan itu sendiri (Sakti, 2018).

Kajian aksiologi dalam ilmu administrasi, yang berkaitan dengan substansi penerapan ilmu administrasi pada manusia. Aplikasi ini termasuk menentukan bagaimana berperilaku dalam aktivitas dan membuat penilaian tindakan manusia. Kemudian, dalam ranah aksiologi ilmu administrasi, ada dua macam pengaturan dan keteraturan: (1) pengaturan dan keteraturan berpikir rasional, dan (2) pengaturan dan keteraturan berbuat dalam upaya mewujudkan kesejahteraan manusia (Hasan, 2019).

Sifat, substansi, dan signifikansi filsafat aksiologis dalam administrasi publik dikaji dalam studi penelitian ini. Administrasi negara adalah bidang ilmu sosial. Penulis berkonsentrasi pada analisis Ilmu Administrasi Negara. Secara lebih khusus, penulis akan memaparkan unsur aksiologis secara lugas. Sains terus berkembang, dan potensinya tidak terbatas. Analisis pengetahuan ini bersifat dinamis bukan statis. Stabilitas sains tidak ada di samping pertumbuhannya. Analisisnya lebih dinamis daripada statis. Kemajuan ilmu pengetahuan berdampak signifikan terhadap aktivitas civitas akademika (penelitian, pembelajaran, bahkan pengabdian kepada masyarakat) (Fauzan, 2018).

Ilmu administrasi negara mengalami pergeseran dari waktu ke waktu. Administrasi dan tata pemerintahan dipelajari dalam Ilmu Administrasi Negara. Proses administrasi dan pemerintahan telah mengalami beberapa kemajuan dan perubahan. Seperti yang kita ketahui bersama, sains tidak berhenti pada satu titik; sebaliknya, itu berkembang seiring dengan kemajuan pemikiran manusia dalam studinya. Adanya ilmu yang dianggap penting oleh penulis menjadi alasan mengapa penulis memilih ilmu Administrasi Publik untuk dipelajari. Mengingat Ilmu Administrasi Negara telah

menjauhkan diri dari Ilmu Politik dan telah mengalami peneguhan identitas melalui aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi, maka aksiologi implisit Administrasi Publik akan digunakan dalam penelitian ini.

METODE

Penulis artikel ilmiah ini menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis fenomena sosial politik yang terjadi di masyarakat. Penulis menganalisis fenomena tersebut dengan menggunakan metode kualitatif karena hubungan antar variabel yang disajikan dapat dipelajari secara kualitatif. Menurut Sugiyono (2011), peneliti metode kualitatif umumnya menggunakan metode untuk mendeskripsikan peristiwa secara kronologis, menjelaskan hubungan yang mendalam antar variabel, dan menyelidiki makna atau nilai yang muncul dalam masyarakat. Keputusan untuk menggunakan metodologi kualitatif dalam penelitian ini memungkinkan adanya eksplorasi dan pengumpulan informasi dan fakta dari para informan sebagaimana adanya, menurut pandangan para informan itu sendiri, melalui pengumpulan data berupa fakta-fakta yang diungkapkannya, sesuai dengan bahasa dan pandangan informan. Inilah sebabnya mengapa peneliti memberikan banyak kesempatan kepada responden untuk membagikan pemikiran mereka, memastikan bahwa tanggapan mereka akan komprehensif dan akurat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mengenal Ilmu Administrasi Negara

Administrasi Publik dimulai ketika Woodrow Wilson (1887), yang kemudian menjadi Presiden Amerika Serikat dari tahun 1913 hingga 1921, menerbitkan "The Study of Administration" di *Political Science Quarterly*. Kebencian Wilson muda terhadap sistem rampasan, yang menyebabkan administrasi yang tidak efisien di AS, menyebabkan pembuatan artikel tersebut. Inefisiensi manajemen negara. Ilmu Politik pada saat itu sulit digunakan, jadi Wilson menciptakan Ilmu Administrasi. Ilmu Administrasi Wilson mempromosikan efisiensi pemerintah dan sistem jasa dengan memisahkan urusan publik dari masalah pelayanan publik (Kumorotomo & Widaningrum, 2010).

Banyak ilmuwan administrasi menganggap penjelasan ilmiah Frank J. Goodnow tentang teori Wilson dalam bukunya "Politics and Administration" pada tahun 1900 sebagai asal mula Ilmu ini dan kemandiriannya dari Ilmu Politik. Ini disebut sebagai era dualitas politik-administrasi. Sebagai ekspresi kehidupan keilmuannya, Ilmu Administrasi Negara berupaya mendefinisikan ontologi, epistemologi, dan aksiologi yang berbeda dengan Ilmu Politik melalui paradigma ini (Munaf, 2016).

Ilmu Administrasi Negara diartikan sebagai proses pengurusan suatu peraturan yang sesuai bagi negara dan mengatur jalannya negara. Secara lebih khusus, itu terdiri dari teori organisasi, manajemen dan kebijakan publik, analisis dan perumusan kebijakan publik, manajemen birokrasi dan pelayanan publik, penelitian sosial, dan bahkan hubungan birokrasi antara sektor swasta dan pemerintah (Ridwan & Sudrajat, 2020).

Ilmu Administrasi memiliki fokus penelitian, khususnya sebagai fokus proses administrasi dan sebagai tempat praktek, terutama entitas pemerintah. Ini berubah setelah transisi dari Administrasi Publik ke Manajemen dan Kebijakan Publik. Peralihan dari Administrasi Publik ke Administrasi Publik, dan setelahnya dari Administrasi Publik ke Manajemen dan Kebijakan Publik, berdampak besar pada studi ontologi ilmu ini. Lokus administrasi negara, menurut Dwiyanto (2018), terlalu terbatas bagi entitas pemerintah untuk menjadi hub administrasi publik. Ilmu administrasi dianggap terlalu terbatas dan tidak relevan pada awal abad kedua puluh satu, yang menjadi semakin kompleks dan dinamis. Perubahan dari birokrasi pemerintah menjadi organisasi publik berkaitan dengan menjadi

administrator publik. Kemudian, dari Administrasi Publik ke Manajemen Kebijakan Publik lebih ditekankan pada pemilahan instrumen kebijakan publik dan prosedur pengelolaannya.

Ada cara untuk administrasi publik. Dalam buku mereka "Administrasi Publik," J.M. Pfifner dan Robert V. Presthus (1960) menggunakan tiga teknik untuk meneliti administrasi publik, khususnya:

1. Constitutional-legal-historical approach. (Pendekatan berdasar kepada sejarah hukum konstitusi). Metode ini didasarkan pada kerangka hak dan kewajiban pemerintah yang ditentukan oleh Undang-Undang Dasar atau ditentukan sebelumnya oleh gagasan atau keputusan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, bentuk penelitian saat ini dianggap memberikan pandangan terbatas administrasi publik.
2. Structural descriptive approach. (Pendekatan berdasarkan kepada penguraian struktur). Strategi ini hanya menekankan struktur organisasi keteknikan dan administrasi keuangan di sektor publik. Pendekatan ini cenderung memberikan informasi yang relevan dengan administrasi daripada gambaran administrasi.
3. Socio-Psychological-approach. (Pendekatan berdasar kepada psychology sosial). Strategi ini menekankan pentingnya perasaan, sehingga secara akurat menggambarkan bagaimana berperilaku. Perspektif ini berpendapat bahwa proses administrasi dicirikan oleh keteraturan dan konsistensi, atau paling tidak bahwa hubungan manusia merupakan titik pusat kegiatan administrasi.

Ditemukan bahwa penyelesaian perspektif didasarkan pada ketiga pendekatan ini. Dimulai dengan penipuan pertama, yang didasarkan pada sejarah hukum ketatanegaraan. Tekanan ilmiah sedang diterapkan pada undang-undang yang membuat sains tunduk pada konstitusi. Hal ini menunjukkan bahwa Ilmu Administrasi Publik lebih menganut objektivisme daripada intersubjektivisme pada saat itu. Kemudian ada perubahan yang lebih mendesak dalam struktur dan administrasi keuangan. Sedangkan ilmu administrasi publik menjadi semakin tidak tunduk pada satu teori universal, mereka bahkan dapat bertentangan dengan teori ini dan menciptakan teori mereka sendiri, menunjukkan bahwa ilmu yang berkembang bukanlah ilmu yang statis.

Secara umum ilmu administrasi publik yang berkembang menjadi manajemen dan kebijakan publik dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Ontologi adalah aktualitas sesuatu yang terkait dengan pemecahan masalah perangkat kebijakan publik dan proses administrasi di dalam pemerintahan.
2. Epistemologi yang digunakan adalah fenomenologi, hermeneutik, dan teori kritis sebagai hasil kritik terhadap positivisme, serta ilmu-ilmu sosial lainnya yang menggunakan metode penelitian kualitatif.
3. Aksiologi adalah keterlibatan diri dalam realitas sejauh itu mempengaruhi perilaku objek studi.

Implikasi Aksiologi dalam Ilmu Tata Negara

Mengubah aksioma seseorang adalah apa yang filsafat aksiologi lakukan. Karena suatu ilmu pengetahuan selalu ada dan dihadapkan pada persoalan-persoalan yang berdasarkan fakta, maka nilai-nilai yang menjadi energi atau motivasinya dapat meluas dan menciut sesuai dengan sifat nilai-nilai yang memimpinnnya. Penilaian faktual adalah penegasan deskriptif tentang kualitas empiris atau dengan mengacu pada hubungan antara hal-hal, sedangkan penilaian nilai adalah evaluasi terhadap realitas tertentu, meskipun hanya dalam bentuknya saat ini. Penilaian nilai, bagaimanapun, adalah elemen evaluasi yang dapat bersifat subyektif atau obyektif (Susanto, 2021).

Sementara yang terakhir terjadi ketika hasil yang diantisipasi benar-benar terjadi, yang pertama mengacu pada pertimbangan nilai yang dapat dilihat sebagai ekspresi perasaan atau

keinginan seseorang. Dalam pengertian ini, nilai mencakup segala keinginan dan kebutuhan subjektif dan objektif kita. Norma terbentuk ketika seperangkat nilai diterima sebagai universal dan digunakan untuk menetapkan standar konkret untuk perilaku sosial. Ketika diberi kekuatan pengaturan dan paksaan, norma menjadi undang-undang. Dan jika isi undang-undang dapat diterima oleh semua orang pada waktu yang sama, tanpa memandang ruang, waktu, atau keadaan, maka norma atau hukum tersebut telah menjadi prinsip umum atau kaidah perilaku.

Semua faktor ini, serta kelas sosial ekonomi seseorang atau masyarakat yang lebih besar, dapat digunakan dalam konteks administrasi nilai, norma, dan harapan. Memaksimalkan efisiensi dan efektivitas melalui administrasi tradisional merupakan prioritas. Rasio optimal output terhadap input adalah nilai efisien. Efektivitas adalah nilai yang menuntut hasil tertentu, tetapi substansi adalah tatanan yang dapat menghasilkan konsistensi dan ketepatan dalam pelaksanaan tugas yang diberikan. Menurut catatan Azhar tentang kemanusiaan, di sinilah model efisiensi dan efektivitas yang bersaing dapat ditemukan:

1. Model tujuan rasional analog dengan menentukan efektivitas.
2. Model koneksi manusia berfungsi sebagai ukuran umum kepemimpinan.
3. Model sistem terbuka adalah pengukuran berdasarkan konsep bahwa untuk berkembang, organisasi bergantung pada pertukaran antara "jasa atau barang" yang dihasilkan oleh organisasi dan lingkungannya.
4. Model proses internal adalah metrik yang menilai efisiensi proses internal. Menurut pandangan peserta simulasi, organisasi merupakan sesuatu yang penting pada semua fase perkembangan.

Evolusi administrasi sebagai ilmu juga mengarah pada nilai-nilai berikut:

1. Nilai Pengembangan Organisasi

Organisasi adalah kumpulan orang-orang yang berkumpul untuk melakukan tugas tertentu sebagai satu kesatuan yang utuh. Pada dasarnya ada empat hal yang perlu diketahui tentang bagaimana sebuah organisasi dijalankan:

- a. Nilai pengetahuan merupakan penyangga nilai ilmiah yang dihasilkan dalam proses penyelenggaraan kegiatan organisasi.
- b. Nilai yang diberikan berasal dari fakta bahwa orang akan berusaha keras untuk memastikan kenyamanan mereka sendiri di tempat kerja.
- c. Merangkul keragaman sebagai sesuatu yang diberikan untuk membangun keharmonisan dalam suatu institusi adalah nilai jamak.
- d. Nilai kritik adalah skeptisisme yang muncul dari pengelolaan infrastruktur perusahaan yang hati-hati.

Ada tiga konstanta yang mendefinisikan administrasi sebagai substansi, yang pertama adalah fungsi perencanaan, yang menghubungkan proses dialog pemikiran manusia tentang apa yang ingin dicapai, bagaimana mencapainya, dan apa yang harus dilakukan dalam penawaran. Mempertimbangkan luasnya fungsi kedua, nilai turunan fungsi keteraturan adalah sintesis dari dua fungsi kedua. Setiap langkah dalam proses melakukan sesuatu dapat dikategorikan sebagai "pengorganisasian", "pegawain", "pengarahan", "pengendalian", atau "pemotivasian". Ketiga, ada fungsi pemantauan, yang mengubah nilai berdasarkan keinginan dan praktik aktual. Alasan dan pertimbangan digunakan dalam tujuan ketiga.

2. Nilai Pengembangan Model Hubungan Kemanusiaan Dalam Organisasi

Struktur organisasi atau gambaran tentang hubungan yang diperlakukan dapat memberikan wawasan tentang model (makna abstrak) hubungan manusia karena mengungkapkan adanya hubungan jaringan manusia dalam pelaksanaan tugas yang terbentuk secara fungsional.

Model organisasi (teori) adalah kerangka kerja untuk mendefinisikan hubungan sebab akibat dengan tujuan menyelesaikan masalah hubungan di dalam suatu organisasi. Model yang menggambarkan node dalam jaringan hubungan manusia organisasi merupakan paradigma hubungan manusia dalam organisasi. Hubungan manusia dalam organisasi dilihat melalui perspektif organisasi, atau "model", dalam konteks ini.

Nilai dalam ilmu Administrasi Negara yang berkembang sejalan dengan implikasi aksiologi administrasi adalah:

- a. Nilai daya tanggap adalah nilai yang mendorong penyelenggaraan yang peka terhadap lingkungan. Sebagai hasil dari nilai ini, ekologi administratif muncul.
- b. Nilai partisipasi dalam mengambil keputusan. Mempertimbangkan masukan dari pekerja dan warga saat membuat keputusan. Hal inilah yang melahirkan pemberdayaan atau demokratisasi sistem pengambilan keputusan yang dimaksudkan untuk mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa.
- c. Nilai keadilan sosial Nilai-nilai yang memerlukan generalisasi berbasis kelas sosial dari keluaran layanan masyarakat.
- d. Nilai pemilihan warga. Nilai yang membutuhkan pengembangan jenis layanan lain untuk memperluas pilihan. Kontrak sosial dapat membantu menghindari tumpang tindih.
- e. Nilai tanggung jawab administrasi untuk efektivitas program.

Semua ini adalah prinsip-prinsip kontemporer yang harus dimasukkan ke dalam kerangka tatanan administrasi. Hasil penelitian, kajian ilmiah, dan khususnya kajian filosofis aksiologi diharapkan dapat menjadi apakah administrasi dapat mengontrol semua nilai tersebut atau apakah semua nilai tersebut akan mempengaruhi kinerja sistem untuk menciptakan ketertiban melalui kerjasama.

SIMPULAN

Ketika filsafat dan sains berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain, kumpulan pengetahuan hibrida yang dikenal sebagai filsafat sains muncul dan tumbuh. Filsafat ilmu memandang lebih serius pada inti persoalan ilmu karena objek formalnya adalah substansi ilmu. Ontologi, epistemologi, dan aksiologi adalah tiga disiplin dasar. Pandangan aksiologis ketatanegaraan menekankan pentingnya nilai sebagai motor penggerak perluasan dan pematangan suatu disiplin ilmu, dimana nilai-nilai tersebut menjadi landasan bagi segala pertimbangan selanjutnya. Nilai-nilai seperti ketanggapan, keterlibatan warga dalam pengambilan keputusan, keadilan sosial, dan pilihan warga muncul sesuai dengan aksiologi yang dikemukakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adib, H. M. (2011). Filsafat Ilmu: Ontologi, Epistemologi, Aksiologi, dan Logika Ilmu Pengetahuan.
- Anzaikhan, M. (2020). Ontologi Filsafat dalam Ilmu Falak dan Implementasinya bagi Praktek Ibadah Umat Muslim. *Al-Ijtimai: International Journal of Government and Social Science*, 6(1), 63-74.
- Bachtiar, A. (2012). Filsafat Ilmu Edisi Revisi. *Jakarta: Raja Grafindo Persada*.
- Dwiyanto, A. (2018). *Administrasi Publik: Desentralisasi Kelembagaan dan Aparatur Sipil Negara*. UGM PRESS.
- Fauzan, H. S. (2018). Filsafat Ilmu Administrasi sebagai Hakikat dan Makna dalam Keilmuan Administrasi Publik. *Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik*, 8(1), 31-42.
- Hasan, J. (2019). Aksiologi Ilmu Pengetahuan (Telaah Tentang Manfaat Ilmu Pengetahuan dalam Konteks Ilmu Dakwah). *Al-Idarah: Jurnal Manajemen dan Administrasi Islam*, 3(1), 95-108.

- Kumorotomo, W., & Widaningrum, A. (2010). Reformasi Aparatur Negara Ditinjau Kembali. *Yogyakarta: Gava Media*.
- Mariyah, S., Syukri, A., Badarussyamsi, B., & Rizki, A. F. (2021). Filsafat dan Sejarah Perkembangan Ilmu. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 4(3), 242-246.
- Munaf, Y. (2016). Hukum Administrasi Negara. *Marpoyan Tujuh, Pekanbaru*.
- Pfiffner, J. M., & Presthus, R. (1960). Public Administration. 1st ed. *New York: The Ronald Press Co.*, 196.
- Ridwan, I. H. J., & Sudrajat, M. A. S. (2020). *Hukum administrasi Negara dan kebijakan pelayanan publik*. Nuansa Cendekia.
- Sakti, F. T. (2018). *Morfologi Filsafat Administrasi*. Bandung: Unpas Press.
- Sawir, M. (2021). *Ilmu Administrasi dan Analisis Kebijakan Publik Konseptual dan Praktik*. Deepublish.
- Siagian, S. P. (2011). *Filsafat Administrasi*. Bumi Aksara.
- Sugiyono, P. (2011). Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. *Alfabeta, Bandung*.
- Susanto, A. (2021). *Filsafat Ilmu: Suatu Kajian dalam Dimensi Ontologis, Epistemologis, dan Aksiologis*. Bumi Aksara.
- Tarigan, M., Fadillah, S. I., Tanjung, N. F., Manurung, S. S. D., & Jannah, M. (2022). Landasan Ontologi, Epistemologi, Aksiologi Keilmuan. *Jurnal Studi Sosial dan Agama (JSSA)*, 2(2), 92-105.